Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 7, Nomor 1, 2026: 79-95
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE REALIZATION OF THE JAMBI CITY REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI

Salsa Devina Azzahara [1)*]

Siti Hodijah [2)]

Al parok [3)]

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesrsitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: salsadevinaa23@gmail.com [1)]

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 7, No. 1, Januari - April 2026: 79-95
DOI: http://10.22437/jar.v7i1.57102

ABSTRACT

This study analyzes the growth, effectiveness, and efficiency of the Jambi City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the 2019-2024 period as an indicator of good financial governance. The study employs a quantitative descriptive method using secondary data from the Budget Realization Reports (LRA) of the Jambi City Government from 2019 to 2024. The analysis measures APBD growth through growth ratios, effectiveness through effectiveness ratios, and efficiency through efficiency ratios. The results indicate that regional revenue and expenditure realization fluctuated but generally showed an increasing trend over the study period. The Jambi City Government effectively achieved its revenue targets with effectiveness ratios ranging from 93.6% to 101.4%, although it still needs to optimize expenditure management to improve budget efficiency, as reflected by efficiency ratios ranging from 88.7% to 93.3%.

Keyword: *Regional Revenue and Expenditure Budget, Effectiveness, Efficiency, Regional Finance, Budget Realization.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan, efektivitas, dan efisiensi realisasi APBD Kota Jambi periode 2019–2024 sebagai indikator tata kelola keuangan daerah yang baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi tahun 2019-2024. Penelitian ini mengukur perkembangan APBD melalui rasio pertumbuhan, efektivitas melalui rasio efektivitas, dan efisiensi melalui rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi mengalami fluktuasi, tetapi secara umum memperlihatkan tren peningkatan. Pemerintah Kota Jambi berhasil merealisasikan target pendapatan secara efektif dengan rasio 93,6%-101,4%, namun masih perlu mengoptimalkan pengelolaan belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dengan rasio 88,7%-93,3%.

Kata kunci: APBD, Efektivitas, Efisiensi, Keuangan Daerah, Realisasi Anggaran.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam menentukan kekuatan atau kelemahan suatu wilayah, sehingga dalam upaya mencapai pembangunan nasional diperlukan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang memerlukan dukungan anggaran secara berkelanjutan (Ihalauw, 2023). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya pelimpahan kuasa yang lebih luas bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola seluruh urusan pemerintahan di wilayahnya. Otonomi daerah memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengupayakan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang selaras dengan situasi dan ciri khas wilayahnya, (Bahasoan 2024).

Pemberian otonomi dan desentralisasi tersebut ditujukan agar mampu mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah sehingga prinsip good governance dapat terwujud (Fathiyah, 2020). Penyelenggara pemerintahan daerah perlu ditopang oleh sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan good governance. Sistem pengelolaan tersebut harus adaptif terhadap dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (Moenek, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang mencakup penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Fathiyah 2020) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang berorientasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan bukan hanya sebagai alat perencanaan keuangan, melainkan juga sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah (Ricko, 2024).

Pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengetahui sejauh mana kapasitas anggaran daerah dalam menanggung belanja daerah, sekaligus menampilkan bahwa dana publik telah digunakan secara efisien dan efektif (Pappa, 2023). Pengelolaan daerah yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan berlandaskan prinsip value for money, partisipasi, transparansi, akuntabilitas serta keadilan dapat menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada penurunan angka pengangguran (Sari, 2018).

Efektivitas serta efisiensi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai faktor utama untuk menjamin penyaluran dana melalui program dan kegiatan yang telah dirumuskan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas dan efisiensi termasuk sebagai unsur penting dalam mewujudkan *good governance*, sebuah isu yang mulai mengemuka sejak awal penerapan otonomi daerah.

Realitasnya, masih banyak pemerintah daerah yang kurang memperhatikan good governance dalam pengelolaan anggaran daerah (Rahman & Saputra, 2022).

Efisiensi dapat diukur dari sejauh mana output mampu mencapai target serta sasaran yang ditentukan (Muflihani, 2018). Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perbandingan antara total realisasi pendapatan daerah sehingga perbedaan antara keduanya dapat terlihat secara jelas (Sudaryo, 2021). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh sejauh mana output mampu mendukung pencapaian tujuan program atau kegiatan, (Koromath 2020). Efisiensi dan efektivitas merupakan indikator utama yang berfungsi sebagai menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mampu merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Suryani dan Wibowo (2019), efektivitas dan efisiensi merupakan ukuran kinerja keuangan yang menentukan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan prinsip value for money. Artinya, anggaran daerah tidak cukup hanya terealisasi tinggi, serta perlu memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat dengan biaya sehemat mungkin. Dengan demikian, analisis efektivitas dan efisiensi bukan sekedar alat pengukuran, tetapi juga sarana evaluasi kualitas pengelolaan keuangan publik.

Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah, disajikan data anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Kota Jambi periode 2019-2024.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2019	1.675.902.071.976,00	**1.699.542.709.763,06**
2020	1.617.658.414.714,00	**1.621.827.275.396,39**
2021	1.658.405.928.034,00	**1.652.948.449.754,68**
2022	1.670.844.950.471,00	**1.668.797.755.118,00**
2023	1.755.751.906.289,00	**1.662.743.583.686,24**
2024	1.886.534.704.938,00	**1.765182.353.921,88**

Sumber: www.jambikota.bps.go.id

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2019	1.847.519.084.475,00	**1.660.527.631.709,83**
2020	1.826.930.849.781,00	**1.665.932.584.837,45**
2021	1.961.694.919.058,00	**1.740.357.878.019,78**
2022	1.812.832.658.629,00	**1.622.747.432.178,57**
2023	1.863.794.648.856,00	**1.720.255.456.671,30**
2024	1.928.586.899.927,00	**1.800.252.368.262,71**

Sumber: www.jambikota.bps.go.id

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini kemudian memusatkan perhatian pada dua aspek pokok dalam pelaksanaan APBD, yakni efektivitas dalam realisasi pendapatan daerah dan efisiensi dalam realisasi belanja daerah. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif ketika pelaksanaannya mampu mencapai tujuan serta sasaran akhir yang telah ditetapkan dalam kebijakan (spending wisely), sementara itu kegiatan dikatakan efisien apabila hasil atau output yang diharapkan dapat diperoleh dengan pemanfaatan sumber daya dan anggaran secara optimal, yaitu dengan biaya seminimal mungkin (Sari, 2018).

Penelitian yang dilakukan Tiawarma dkk pada tahun 2022 pada pemerintah daerah Kota Metro, diketahui bahwa tingkat efektivitas realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam kategori efektif pada tahun 2018 serta meningkat menjadi sangat efektif pada tahun 2019 dan 2020. Sementara itu, tingkat efisiensi realisasi belanja tergolong cukup efisien pada tahun 2018 dan meningkat menjadi efisien pada dua tahun berikutnya, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Berikutnya, penelitian yang dipaparkan oleh Theresia pada tahun 2021 di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa realisasi APBD di daerah tersebut telah berjalan sangat efektif dengan tingkat efiiensi yang juga tergolong sangat baik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah (Atmaja, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Ketentuan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan keuangan daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep Good *Governance* dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berfokus pada upaya mewujudkan pembangunan sektor publik yang efektif, transparan. Dan berioentasi pada kepentingan masyarakat (Suparji, 2019).

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Dedi Nordiawan realisasi anggaran pendapatan dan belanja merupakan laporan yang menggambarkan secara komprehensif ringkasan mengenai sumber, alokasi serta penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam satu periode pelaporan tertentu (Iqbal, 2017). Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan. Melalui laporan realisasi anggaran, pemerintah dapat menunjukkan tingkat pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu bentuk utama pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik (Nurlaeli, 2024). Laporan ini menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi sumber daya publik, anggaran juga menjadi alat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja organisasi. (Milenia, 2017).

Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalan mencapau tujuan yang ditetapkan, di mana organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila seluruh kegiatan dan sumber dayanya mampu diarahkan secara tepat sehingga menghasilkan pencapaian dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan (Tangdi, 2025). Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila seluruh kegiatan dan sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan.

Pengelolaan sumber daya yang terencana memungkinkan organisasi melaksanakan berbagai aktivitas secara terkoordinasi dan terarah. Setiap bagian organisasi perlu menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan agar sasaran dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, efektivitas menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengubah berbagai sumber daya yang tersedia menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan bahwa organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran yang direncanakan secara tepat dan optimal.

Efektivitas merupkan ukuran sejauh mana hasil suatu program berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yang secara sederhana menggambarkan perbandingan antara outcome dan ouput yang dihasilkan (Darmadi, 2021). Konsep efektivitas menekankan pada tingkat

keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan. Semakin besar tingkat ketercapaian target yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, efektivitas sering dijadikan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Penilaian efektivitas membantu organisasi mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara optimal Pada bagian ini dituliskan teori-teori dan kejian-kajian pustaka yang diberhubungan dengan objek penelitian. Hipotesis yang di bangun sesui dengan penelitian-penelitian terdahulu serta kajian- kajian yang berhubungan dengan penelitian.

Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo, efisiensi merupakan konsep yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat produktivitas suatu organisasi atau kegiatan (Tangdi, 2025). Efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses pelaksanaannya. Perbandingan tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar output yang diperoleh dari sejumlah input tertentu, semakin tinggi tingkat efisiensi yang dapat dicapai. Oleh karena itu, efisiensi sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja dan produktivitas suatu kegiatan.

Menurut Sedarmayanti, efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya dimanfaatkan secara optimal dalam suatu proses kegiatan (Raafi, 2023). Konsep ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang tersedia secara tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa tenaga kerja, waktu, biaya, teknologi, maupun sarana pendukung lainnya. Melalui penerapan efisiensi, organisasi dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian hasil. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan suatu kegiatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena secara objektif melalui penggunaan data berupa angka-angka, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terukur mengenai kondisi atau keadaan yang sedang diteliti (Habibi, 2024). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan jenis informasi yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah mengumpulkan atau mengolahnya terlebih dahulu

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang sudah tersedia

dalam bentuk dokumen resmi dari instansi terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi, yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Kota Jambi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis efektivitas dan efisiensi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Analisis efektivitas digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, analisis efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dalam pelaksanaan anggaran.

Tingkat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi dengan menggunakan rasio pertumbuhan (Growth Ratio) berdasarkan teori (Mahmudi 2019). Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur perubahan kinerja keuangan daerah dari satu periode ke periode berikutnya.

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{Nilai\ Tahun\ n - Nilai\ Tahun\ (n-1)}{Nilai\ Tahun\ (n-1)} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan Kota Jambi dengan menggunakan rasio efektivitas berdasarkan teori (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

$$Efektivitas\ Pendapatan = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	**Sangat Efektif**
100	**Efektif**
90 – 99	**Cukup Efektif**
75 – 89	**Kurang Efektif**
<75	**Tidak Efektif**

Sumber: Mahmudi (2019)

Analisis terhadap tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Kota Jambi dengan menggunakan rasio efisiensi berdasarkan teori Kawatu (2019) dengan rumus:

$$Efisiensi\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<60	**Sangat Efisien**
60 – 80	**Efisien**
80 – 90	**Cukup Efisien**
90 – 100	**Kurang Efisiesn**
>100	**Tidak Efisien**

Sumber: Mahmudi (2019)

HASIL

Tingkat Perkembangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2019-2024

Perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun ke tahun perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi dan kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan pembangunan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan keuangan daerah, perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Kota Jambi 2019-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Perkembangan (%)
2019	1.699.542.709.763,06	**-**
2020	1.621.827.275.396,39	**-4,5**
2021	1.652.948.449.754,68	**1,9**
2022	1.668.797.755.118,00	**0,9**
2023	1.662.743.583.686,24	**-0,4**

2024	1.765.182.353.921,88	**6,2**
	Rata-rata	**0,8**

Sumber: Data Diolah, 2026

Perkembangan pendapatan daerah Kota Jambi selama periode 2019–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, namun secara umum mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,70 triliun dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,5% menjadi Rp1,62 triliun akibat dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 dan 2022, dimana realisasi pendapatan meningkat masing-masing sebesar 1,9% dan 0,9%. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang mencerminkan proses pemulihan ekonomi pascapandemi serta membaiknya kondisi fiskal daerah.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah kembali mengalami penurunan sebesar 0,4% menjadi Rp1,66 triliun akibat berkurangnya Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, meskipun PAD terus meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2024 pendapatan daerah meningkat signifikan sebesar 6,2% menjadi Rp1,77 triliun, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya PAD serta Pendapatan Transfer, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Secara keseluruhan, perkembangan pendapatan daerah Kota Jambi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang cukup baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Data anggaran dan realisasi pendapatan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas dan efisiensi APBD melalui tingkat pencapaian realisasi terhadap target anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Perkembangan realisasi belanja kota jambi tahun 2019-2024

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Perkembangan (%)
2019	1.660.527.631.709,83	**-**
2020	1.665.932.584.837,45	**0,3**
2021	1.740.357.878.019,78	**4,5**
2022	1.622.747.432.178,57	**-6,8**
2023	1.720.255.456.671,30	**6,0**
2024	1.800.252.368.262,71	**4,7**
	Rata-rata	**1,7**

Sumber: Data Diolah, 2026

Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Jambi selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi belanja mencapai Rp1,66 triliun dari anggaran sebesar Rp1,85 triliun. Tahun 2020 realisasi belanja meningkat tipis sebesar 0,3% menjadi Rp1,67 triliun akibat adanya penyesuaian anggaran selama pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 belanja daerah meningkat cukup signifikan sebesar 4,5% menjadi Rp1,74 triliun yang didorong oleh kenaikan belanja operasi dan belanja modal sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik. Namun, pada tahun 2022 realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 6,8% menjadi Rp1,62 triliun, terutama akibat berkurangnya belanja modal dan belanja tak terduga.

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2022, realisasi belanja daerah kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 6,0% menjadi Rp1,72 triliun dan terus bertambah pada tahun 2024 sebesar 4,7% hingga mencapai Rp1,80 triliun, yang merupakan realisasi tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya belanja operasi, belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan belanja daerah Kota Jambi menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Jambi memiliki kapasitas fiskal yang semakin baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik.

Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2019-2024

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dan target anggaran pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan selama satu periode anggaran. untuk lebih jelasnya, tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan Kota Jambi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5. efektivitas realisasi APBD Kota Jambi Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	1.675.902.071.976,00	1.699.542.709.763,06	101,4	**Sangat Efektif**
2020	1.617.658.414.714,00	1.621.827.275.396,39	100,3	**Sangat Efektif**
2021	1.658.405.928.034,00	1.652.948.449.754,68	99,7	**Efektif**
2022	1.670.844.950.471,00	1.668.797.755.118,00	99,9	**Efektif**

2023	1.755.751.906.289,00	1.662.743.583.686,24	94,7	**Efektif**
2024	1.886.534.704.938,00	1.765.182.353.921,88	93,6	**Efektif**

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pendapatan APBD Kota Jambi tahun 2019–2024, tingkat efektivitas pendapatan menunjukkan kinerja yang sangat baik meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio efektivitas masing-masing mencapai 101,4% dan 100,3% sehingga termasuk kategori sangat efektif karena realisasi pendapatan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 rasio efektivitas sebesar 99,7% dan 99,9% yang masih berada dalam kategori efektif. Tingginya tingkat efektivitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi mampu merealisasikan pendapatan daerah hampir sesuai dengan target anggaran melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas pendapatan menurun menjadi 94,7% dan 93,6%, namun tetap berada dalam kategori efektif. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi pendapatan yang belum sepenuhnya mencapai target, terutama akibat fluktuasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya target pendapatan yang ditetapkan. Meskipun demikian, seluruh rasio efektivitas selama periode penelitian tetap berada di atas 90%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah Kota Jambi masih berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, hasil tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan pendapatan secara efektif guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi 2019-2024

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja dan anggaran belanja yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui tingkat penggunaan anggaran secara hemat dan tepat sasaran dalam satu periode anggaran. Semakin kecil rasio antara realisasi dan anggaran belanja, maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut (Hastuti & Nasution, 2024). Untuk lebih jelasnya, tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Kota Jambi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Table 6. Efisiensi Realisasi Belanja Kota Jambi Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2019	1.847.519.084.475,00	1.660.527.631.709,83	89,8	**Cukup Efisien**

2020	1.826.930.849.781,00	1.665.932.584.837,45	91,2	**Kurang Efisien**
2021	1.961.694.919.058,00	1.740.357.878.019,78	88,7	**Cukup Efisien**
2022	1.812.832.658.629,00	1.622.747.432.178,57	89,5	**Cukup Efisien**
2023	1.863.794.648.856,00	1.720.255.456.671,30	92,3	**Kurang Efisien**
2024	1.928.586.899.927,00	1.800.252.368.262,71	93,3	**Kurang Efisien**

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi belanja APBD Kota Jambi tahun 2019–2024, rasio efisiensi menunjukkan kondisi yang berfluktuasi pada kategori cukup efisien dan kurang efisien. Pada tahun 2019, tingkat efisiensi mencapai 89,8% dan termasuk kategori cukup efisien. Tahun 2020 rasio meningkat menjadi 91,2% sehingga masuk kategori kurang efisien akibat meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 tingkat efisiensi masing-masing sebesar 88,7% dan 89,5% yang masih berada dalam kategori cukup efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan penggunaan anggaran meskipun kebutuhan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat.

Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 92,3% dan 93,3% sehingga termasuk kategori kurang efisien. Peningkatan rasio tersebut dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan, tingkat efisiensi belanja Kota Jambi selama periode penelitian masih menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik karena realisasi belanja tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian dan optimalisasi penggunaan anggaran agar efisiensi pengelolaan APBD dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

PEMBAHASAN

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2019-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Jambi selama periode 2019–2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,69 triliun pada tahun 2019, kemudian menurun sebesar 4,5% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pendapatan kembali meningkat masing-masing sebesar 1,9% dan 0,9% seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4% pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah kembali tumbuh signifikan sebesar 6,2% pada tahun 2024 sehingga

mencapai Rp1,76 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah setelah periode pandemi.

Menurut teori desentralisasi fiskal, perkembangan pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wicaksono et al. (2022) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan daerah, namun diikuti oleh pemulihan pada periode berikutnya. Kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Jambi selama periode penelitian tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan PAD, tetapi juga sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren yang positif, upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD masih perlu terus ditingkatkan.

Efektivitas Realisasi APBD Kota Jambi Tahun 2019–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi pendapatan APBD Kota Jambi selama periode 2019–2024 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif dengan rasio berkisar antara 93,6% sampai 101,4%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Jambi mampu merealisasikan target pendapatan daerah secara relatif optimal. Temuan tersebut relevan dengan teori efektivitas Mardiasmo yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks APBD, tingginya rasio efektivitas menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik sehingga target penerimaan dapat dicapai atau bahkan dilampaui pada beberapa tahun tertentu.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Habibi et al. (2024) di Kota Surakarta dan Tangdi et al. (2025) di Kabupaten Toraja Utara yang menemukan bahwa efektivitas APBD berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Namun, penelitian ini menunjukkan fakta empiris bahwa tingginya efektivitas pendapatan Kota Jambi masih dipengaruhi oleh dominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas pendapatan yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sehingga analisis efektivitas perlu dilengkapi dengan kajian struktur sumber pendapatan daerah.

Efisiensi Realisasi APBD Kota Jambi Tahun 2019–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi belanja APBD Kota Jambi selama periode 2019–2024 berada pada kategori cukup efisien dan kurang efisien dengan rasio berkisar antara 88,7% hingga 93,3%. Rasio efisiensi terbaik terjadi pada tahun 2021 sebesar 88,7%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 93,3% yang termasuk kategori

kurang efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mampu merealisasikan program pembangunan sesuai perencanaan, penggunaan anggaran masih relatif tinggi dibandingkan pagu yang tersedia. Kondisi tersebut sesuai dengan teori Mahmudi yang menyatakan bahwa efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output dengan penggunaan input yang optimal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pappa et al. (2023), Mohammad et al. (2023), dan Fathiyah (2020) yang menemukan bahwa tingkat efisiensi APBD di berbagai daerah masih cenderung kurang efisien meskipun efektivitas pendapatannya tinggi. Secara empiris, fluktuasi efisiensi belanja Kota Jambi dipengaruhi oleh meningkatnya belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang terus meningkat untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan adanya fenomena high effectiveness–low efficiency, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah berhasil mencapai target pendapatan secara efektif, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan penggunaan anggaran secara efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat, dengan realisasi pendapatan tertinggi sebesar Rp1,77 triliun dan realisasi belanja tertinggi sebesar Rp1,80 triliun yang keduanya terjadi pada tahun 2024. Analisis efektivitas APBD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi mampu merealisasikan target pendapatan daerah dengan baik, yang tercermin dari rasio efektivitas sebesar 93,6% hingga 101,4% dan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Sementara itu, analisis efisiensi APBD menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berada pada kategori cukup efisien hingga kurang efisien dengan rasio efisiensi berkisar antara 88,7% hingga 93,3%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pencapaian target pendapatan, namun masih perlu mengoptimalkan pengelolaan belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Dengan demikian, peningkatan efisiensi belanja daerah perlu menjadi perhatian untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi perlu terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mempertahankan tingkat efektivitas pendapatan yang telah dicapai. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Upaya tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, efektivitas pendapatan yang tinggi dapat diimbangi oleh efisiensi belanja yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, A. F. (2016). Pengaturan Pergeseran Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah1. Jurnal Lex et Societatis, 4(7), 85–93.

Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(1), 43.https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119

Darmadi, D. (2021). Administrasi Keuangan Daerah. In PT. Cita Intrans Selaras (Citila) (Vol. 11, Issue 1).

Fathiyah, F. (2020). Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 687. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1008

Habibi, Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(1), 483–488. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75

Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 24(2), 157–170. https://doi.org/10.30596/21423

Ihalauw, F. Y., Elim, I., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6(2), 1271–1280.

Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2017). Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Akurat |Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8, 62–71

Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. Lensa Ekonomi, 11(01), 13. https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75

Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Economic Ideas You Should Forget, 5(2), 23–25. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47458-8_9 Moenek, R. S. D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara.Topbusiness.

Moenek, R. S. D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara. Topbusiness.

Mohammad, S., Paul Elia Saerang, D., Gamaliel Jurusan Akuntansi, H., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2023). Analisis Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Pada LRA BPKAD Kota Tidore Kepulauan. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 7(3), 241–250. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/50747

Muflihani. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palu (Studi Kasus Pada Kota Palu). Humanika, 22(2), 117–126.

Nurlaeli, E., & Sigalingging, C. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 –2023 Pada Kabupaten Semarang. Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan, 2(2), 46–56. https://doi.org/10.61696/jusapak.v2i2.323

Pappa, L., Menne, F., & Suriani, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar. Indonesian Journal of Business and Management, 6(1), 01–16. https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3870

Raafi Melati Putri, & Indri Yuliafitri. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022. OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 4(1), 64–78. https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2586

Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. Humanika, 22(2), 117–126. https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277

Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Kinerja, 15(1), 38. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051

Suparji. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. IV (1), 1–5.

Tangdi, M. M., Samsinar, S., & Ryketeng, M. (2025). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(4), 6566–6573. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8015

Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 86–92. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7998